

PLATFORM MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA

Oleh Nurcholish Madjid

Dari semua uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih dalam pertumbuhan “penjadian diri” (*in making*). Dinamika perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara, dengan *up-and-down* dan *trial-and-error*-nya, mengakibatkan banyak kejadian yang tidak terduga sebelumnya, dan kita cenderung memandangnya sebagai sesuatu yang “spesial”. Padahal boleh jadi bahwa kejadian-kejadian tak terduga itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, mungkin sebuah kewajaran bagi bangsa dan negara muda yang sedang tumbuh dengan cepat.

Tetapi dari logika deretan kejadian-kejadian itu kita juga dapat melihat kaitan logis antara krisis yang sekarang menimpa kita dengan kejadian-kejadian tersebut. Sekalipun cara pandang seperti itu bisa terperosok kepada semacam apologia untuk kejadian-kejadian itu, namun rasanya diperlukan untuk mendasari sikap yang lebih obyektif. Terhadap kejadian-kejadian masa lalu yang sudah menjadi “takdir” Ilahi dan kini tertutup itu kita bisa menyikapi dengan semangat “*let bygones be bygones*”. Tetapi terhadap perjalanan perkembangan bangsa dan negara yang berlangsung di masa sekarang dan bersambung dengan masa mendatang, kita harus menyikapinya sebagai persoalan yang terbuka, yang dapat dicampurtangani dan diarahkan. Justru tantangannya ialah bagai-

mana mencampurtangani perjalanan perkembangan bangsa dan negara itu dan mengarahkan dengan sebaik-baiknya.

Para tokoh pendiri negara telah merintis usaha penggalian ide-ide terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, ide-ide itu belum semuanya terlaksana dengan baik. Bagian-bagian yang telah terlaksana, khususnya wujud negara Republik Indonesia itu sendiri, merupakan modal utama bagi kita, sebagai peninggalan baik para patriot nasionalis pendiri negara itu. Tetapi bagian-bagian yang belum terlaksana, seperti pembangunan nasional demi maslahat umum dengan keadilan dan kejujuran, merupakan sumber berbagai krisis yang melanda kita sekarang ini. Disebabkan oleh faktor kemudahan yang juga berarti kekurangmatangan kita semua sebagai bangsa baru, ide-ide terbaik para pendiri negara itu, dalam pelaksanaannya sering berhadapan dengan apa yang dikatakan Bung Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk mendewasakan diri, sehingga mampu mengakhiri krisis-krisis yang terjadi dan memulai kembali pembangunan negara dengan menggunakan aset-aset yang telah tersedia. Dengan latar belakang keadaan yang kita alami saat ini, untuk memulai pembangunan kembali bangsa dan negara diperlukan beberapa agenda dasar atau *platform* yang sifatnya mendesak.

1. Mewujudkan “*good governance*” pada semua lapisan pengelolaan negara

Telah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa yang pertama-tama diperlukan untuk mengakhiri krisis besar sekarang ini ialah bagaimana mengelola negara secara baik dan benar, berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan (*running government and exercising power*). Tumpukan krisis banyak segi yang menggunung sekarang ini dapat diibaratkan sebuah gunung es raksasa sedemikian besar, sehingga sulit dihancurkan dari kaki dasarnya. Karena gunung es adalah benda mengambang, maka

setiap kali puncaknya dipotong atau dihancurkan, setiap kali pula akan menyembul puncak baru ke permukaan. Tetapi gunung es akan hancur meleleh bila ia bisa diseret dari tempat tumbuhnya di zona dingin sekitar daerah kutub menuju panasnya air laut di zona tropis. Metafora gunung es kiranya dapat sedikit memberi gambaran tentang betapa mustahilnya mengatasi persoalan krisis banyak segi itu jika dilakukan hanya secara parsial, tidak menyeluruh.

Pengelolaan yang benar dan baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dapat diibaratkan sebagai laut zona tropis yang panas, yang akan meluluhkan gunung es budaya KKN. Dalam hal ini diperlukan kekuatan yang besar untuk dapat menyeret gunung es itu ke sekitar khatulistiwa. Kekuatan besar itu ialah tekad bersama seluruh komponen bangsa, untuk secara bahu-membahu menanggung beban tanggung jawab penyelesaian masalah nasional, dan penyatuan seluruh kekuatan nasional dalam semangat "*samen bundeling van alle krachten van de natie*".

Energi yang dihasilkan oleh tekad yang diperbarui dengan dukungan seluruh komponen bangsa itu akan menjadi efisien dan efektif serta terfokus kepada sasaran jika terbentuk jajaran pimpinan nasional yang sanggup memberi teladan, berdiri di barisan paling depan, memulai dengan diri sendiri. Karena itu kepemimpinan tersebut harus benar-benar otentik, menunjukkan ketulusan kesatuan antara ucapan dan tindakan, antara seruan dan pelaksanaan, antara tekad dan perbuatan. Bangsa kita memerlukan suatu jenis kepemimpinan yang memiliki visi tentang masa depan bangsa, seseorang dengan intuisi kepemimpinan, *savvy* atau *savoir-faire* (kearifan batin, *bashîrah*). Ia juga harus aktif-agresif dalam usaha melaksanakan visinya itu, meskipun ia harus bertindak cukup pragmatis berdasarkan realita dalam masyarakat dengan segala kemungkinan dan hambatanya. Pimpinan itu juga harus tetap setia memelihara amanat dan kepercayaan umum, dan berperan sebagai pembina kesepakatan (*concensus builder*) antara berbagai komponen bangsa.

Kepemimpinan yang berwibawa akan tampil menjadi lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (*sense of direction*) dan

kesadaran tujuan (*sense of purpose*) dalam hidup bernegara, dan menjadi dorongan rakyat untuk dengan penuh kerelaan mendukung dan mengambil bagian dalam perjuangan nasional. Dukungan yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan keharusan-keharusan *good governance*, yaitu terbukanya partisipasi umum dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan serta penggunaan kekuasaan; transparansi dalam semua proses itu sehingga tidak terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi, khususnya yang bersangkutan dengan penanganan kekayaan umum milik bangsa dan negara; akuntabilitas (*accountability*), yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua proses dan tindakan itu kepada rakyat secara terbuka.

Mewujudkan *good governance* menjadi perkara mustahil tanpa keikutsertaan seluruh rakyat atas dasar komitmen bersama, menjunjung tinggi asas negara-bangsa (*nation-state*) dengan pembedaan yang tegas antara urusan privat dan urusan publik, antara harta milik *pribadi* dan harta milik umum. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kekayaan negara, biar pun ibaratnya hanya bernilai sepeser, dan tanpa memandang siapa pun yang melakukannya. Berkenaan dengan masalah tersebut, misalnya, sebagai contoh, kita secara keseluruhan masih lemah sekali dalam soal kesadaran tentang penyelewengan transaksi berbentuk *conflict of interest*, akibat adanya unsur patrimonialisme dan feodalisme yang masih kuat dalam struktur sosial-kultural bangsa kita. Maka pengawasan kepada kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara harus dilakukan secara ekstra ketat dan keras, disertai penyadaran bahwa transaksi yang mengandung *conflict of interest* adalah sesungguhnya jenis kejahatan korupsi.

Perjalanan pertumbuhan bangsa kita yang penuh kesulitan antara lain disebabkan oleh adanya hambatan feodalisme. Susunan masyarakat feodalistik bangsa-bangsa Asia Tenggara terbukti oleh adanya identifikasi diri dengan kata ganti nama pertama tunggal yang mengandung nama budak, seperti “saya” (sahaya), “*ambo*” (hamba), “*budak*” dan “*abdi*”, “*kula*” atau “*kawula*”. Sebab memang

ciri utama feodalisme (*feodalism*) ialah “pengkawulan” rakyat kepada “gusti”, dengan hirarki tinggi-rendah yang sedemikian menguasai hidup orang banyak. Feodalisme juga bercirikan penguasaan tanah (*fiefdom*) oleh seorang pemilik yang melaksanakan pembagian hasil yang sangat timpang antara pemilik itu dan penggarap. Dari struktur sosial-ekonomi serupa itu, yang muncul ialah tradisi upeti, baik secara paksa oleh “gusti” kepada “kawula” maupun sukarela oleh “kawula” kepada “gusti”. Diyakini banyak orang bahwa merajalelanya kejahatan korupsi di negeri kita adalah kelanjutan tradisi upeti masyarakat feodal itu, ditambah dengan budaya suap-menyuap dan perjudian oleh kalangan yang tak peduli dengan standar moral karena mengejar keuntungan kebendaan semata. Ditambah dengan mengendornya dimensi keruhanian dalam pola hidup “modern” yang materialistik, orientasi hidup kebendaan, dikaitkan dengan feodalisme, menjadi tolok ukur tinggi-rendahnya “gengsi” dan “harga diri” banyak orang. Dan jika ada “pelarian” dari materialisme yang gawat itu, maka terdapat indikasi bahwa yang menarik hati bukanlah agama yang bersemangat kebenaran yang lapang (*hanîfîyah sambah*), tetapi justru kultus-kultus berbahaya.

Karena itu pembangunan demokrasi, dan beserta dengan itu pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, mensyaratkan dihancurkannya feodalisme. Sekalipun belum tentu merupakan contoh yang dapat ditiru di negeri kita, tetapi revolusi kebudayaan di Republik Rakyat Cina merupakan suatu usaha revolusioner untuk menghancurkan unsur-unsur tidak sehat dalam masyarakat, khususnya feodalisme. Sekali lagi, pemberantasan KKN akan sangat banyak tergantung kepada seberapa jauh kita mampu memberantas feodalisme dan budaya suap-menyuap.

2. Menegakkan supremasi hukum dengan konsisten dan konsekuen

Pelaksanaan *good governance* diharapkan akan mendorong pelaksanaan asas hukum dan keadilan secara tegas, tegas, dan teguh.

Sebaliknya, tanpa tegaknya asas hukum dan keadilan, pelaksanaan *good governance* adalah mustahil. Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala saat ini berdampak sangat negatif kepada usaha penegakan hukum dan keadilan. Karena beroperasinya praktik suap-menyuap yang terkutuk itu, masyarakat semakin banyak kehilangan kepercayaan kepada proses-proses penegakan hukum dan keadilan oleh aparat-aparat yang bersangkutan. Lepas dari benar-tidaknya banyak sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum yang terorganisasi (semacam *organized crime*), segi penegakan hukum memang merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita. Dalam masyarakat terdapat banyak indikasi bahwa tindakan kejahatan berlangsung dengan lindungan helat hukum (*legal device*) sehingga mendapatkan legitimasi legal palsu.

Sebagaimana telah dicoba jelaskan tentang makna konsep *madīnah* atau *medinat* di bagian depan, ketaatan kepada hukum dan aturan adalah pangkal keadaban, *madanīyah* atau *civility*. Sebaliknya, "*lawless society*" atau "masyarakat hukum rimba", adalah ciri masyarakat tak berkeadaban, yang menuju kepada kehancuran. Seperti dalam rimba, dalam keadaan kacau dan lemah hukum, yang berfungsi dalam masyarakat ialah kekuatan dan kekuasaan sewenang-wenang, dan negara hukum (*rechtsstaat*) yang dicita-citakan para pendiri negara berubah menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Yang lemah tidak mampu bertahan hidup menghadapi yang kuat, suatu bentuk Darwinisme dalam kehidupan sosial-politik, dengan hukum "*survival of the fittest*" melalui proses "*natural selection*" yang brutal. Berbeda dengan Darwinisme, terwujudnya kebaikan dalam kehidupan sosial manusia senantiasa memerlukan campur tangan kepemimpinan yang benar dan sadar tugas kemanusiaan. Kearifan Abu Bakar patut dijadikan rujukan di sini, ketika Khalifah itu dalam pidato baiatnya mengatakan, "*Yang kuat di antara kalian bagiku adalah lemah, sampai aku ambil dari*

mereka hak-hak kaum miskin; dan yang lemah di antara kalian bagiku adalah kuat, sampai aku berikan kepada mereka hak-hak mereka”.

3. Melaksanakan Rekonsiliasi Nasional:

a. Menarik pelajaran pahit dari masa lalu dengan tekad tidak mengulanginya

Pengikatan bersama seluruh kegiatan bangsa dengan sendirinya mensyaratkan adanya rekonsiliasi nasional, atas dasar sikap-sikap yang diperbarui, antara sesama anggota masyarakat, yaitu sikap-sikap saling hormat dan saling percaya. Nilai-nilai sosial itu, yang kebenarannya seharusnya dapat disikapi sebagai kewajiban, saat-saat sekarang menjadi bertambah sulit diwujudkan, disebabkan oleh gejolak perkembangan bangsa dan negara dalam sejarah kemerdekaan yang diwarnai kekerasan, perlawanan kepada hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Harus diakui bahwa usaha rekonsiliasi akan berhadapan dengan tembok memori kolektif yang penuh dengan stigma dan trauma. Memori kolektif serupa itu biasanya disertai dengan perasaan dendam kolektif, yang menghalangi tumbuhnya sikap saling mengerti antara berbagai komponen sosial. Pengalaman-pengalaman pahit di masa yang telah lalu adalah sangat berharga bagi kita sebagai bahan pelajaran untuk tidak diulangi lagi di masa mendatang. Mungkin pengalaman-pengalaman itu tidak boleh dilupakan — sebab melupakannya akan membuka pintu pengulangan — tapi demi masa depan yang lebih baik, kita semua dari kalangan yang berbeda-beda harus mulai merintis usaha yang menumbuhkan sikap-sikap saling mengerti posisi masing-masing, kemudian diteruskan menjadi sikap-sikap saling percaya dan saling menghargai. Kita harus belajar menanamkan dalam diri kita masing-masing pandangan bahwa manusia itu pada dasarnya baik, sebelum terbukti jelas bahwa ia berperangai jahat.